

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Reformasi Pengelolaan Keuangan Negara merupakan salah satu periode Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan yang dimulai dari tahun 2002 hingga tahun 2006. Reformasi Pengelolaan Keuangan Negara diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang terkait Keuangan Negara, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004.

Anggaran adalah rancangan keuangan pemerintah yang disusun untuk mencapai tujuan suatu negara. Proses penganggaran dilakukan melalui beberapa pendekatan-pendekatan seperti penganggaran terpadu, Penganggaran Berbasis Kinerja, dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah. Penganggaran Berbasis Kinerja merupakan proses untuk menyusun anggaran suatu lembaga yang fokus pada prestasi kerja dan/atau hasil (termasuk efisiensi hasil dan keluaran).

Tujuan penganggaran berbasis kinerja (PBK) adalah untuk meningkatkan kualitas layanan publik dengan mengalokasikan sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya alam (SDA yang bertujuan untuk meningkatkan politik, sosial, efisiensi, efektivitas, dan meningkatkan akuntabilitas. (Pemerintah Republik Indonesia, 2010) Dalam penyusunan anggaran yang berbasis kinerja, instrumen yang diperlukan adalah standar biaya, indikator, dan evaluasi kinerja yang didapatkan dari setiap program dan jenis kegiatan.

Sebagaimana tertulis dalam Kementerian Keuangan (2013), standar biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal (*chief financial officer*) baik berupa standar biaya masukan maupun standar biaya keluaran, sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran dalam penyusunan RKA-K/L. Standar biaya masukan (SBM) adalah satuan biaya yang dibuat oleh pemerintah untuk penyusunan biaya komponen *output*. Instrumen tersebut diharapkan dapat dijadikan dasar untuk pengelolaan keuangan negara yang berkualitas, khususnya dalam bidang penganggaran negara.

Standar biaya masukan tahun 2022 diatur dalam PMK Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022. Sesuai PMK tersebut, Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2022.

Satuan kerja melaksanakan kegiatan dari suatu program wajib untuk menerapkan standar biaya dalam menyusun anggaran. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Pematangsiantar juga menggunakan standar biaya dalam menyusun anggarannya, salah satunya adalah standar biaya masukan. Penulis memilih KPPN Pematangsiantar sebagai objek penelitian didasarkan oleh 3 (tiga) faktor. Faktor yang pertama, KPPN Pematangsiantar memiliki prestasi-prestasi yang sangat baik, baik dalam Kinerja KPPN, Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal Semester, Kinerja Pelaksanaan Anggaran, dll. Faktor yang kedua, penulis tertarik untuk meninjau belanja dari kantor vertikal DJPb, yaitu KPPN Pematangsiantar yang pernah dinobatkan menjadi peringkat 1 dalam Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tingkat Kuasa BUN sampai dengan Triwulan III Tahun 2019 oleh Kakanwil DJPb Provinsi Sumatera Utara. Faktor yang ketiga, karya tulis tugas akhir tahun sebelumnya tidak ada yang meninjau tentang implementasi standar biaya masukan di KPPN Pematangsiantar tahun anggaran 2022.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meninjau implementasi standar biaya yang dilaksanakan di KPPN Pematangsiantar dan melakukan tinjauan terhadap ilmu-ilmu yang telah dipelajari selama di kampus PKN STAN. Hasil tinjauan implementasi standar biaya masukan tersebut akan dilimpahkan dalam karya tulis yang berjudul TINJAUAN ATAS IMPLEMENTASI STANDAR BIAYA MASUKAN PADA SATKER KPPN PEMATANGSIANTAR TAHUN 2022.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam menyusun Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini adalah:

1. Bagaimana implementasi Standar Biaya Masukan di KPPN Pematangsiantar tahun anggaran 2022?
2. Apakah penerapan standar biaya masukan di KPPN Pematangsiantar Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan peraturan yang terkait?

1.3 Tujuan penulisan

Tujuan penulis dalam menyusun Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) adalah sebagai berikut:

1. Meninjau implementasi standar biaya masukan pada Kertas Kerja RKA-K/L Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pematangsiantar tahun anggaran 2022.
2. Meninjau kesesuaian penggunaan standar biaya masukan dalam penyusunan RKA-K/L KPPN Pematangsiantar Tahun Anggaran 2022 dengan Peraturan Menteri keuangan yang telah ditetapkan mengenai standar biaya masukan.

1.4 Ruang lingkup penulisan

Ruang lingkup penulisan yang akan diulas dalam Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini adalah penerapan Standar Biaya Masukan dalam penyusunan RKA-K/L pada satuan kerja KPPN Pematangsiantar untuk tahun anggaran 2022.

1.5 Manfaat penulisan

Manfaat yang dapat diperoleh dari penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah:

1. menjadi sumbangan dalam dunia penelitian ataupun karya ilmiah dalam bidang penganggaran berbasis kinerja (PBK) khususnya tentang standar biaya masukan (SBM); dan
2. sebagai bahan pertimbangan bagi KPPN Pematangsiantar dalam memajukan dan meningkatkan kualitas penganggaran yang berbasis kinerja, terkhusus penerapan standar biaya masukan (SBM) di masa depan.

1.6 Sistematika penulisan

Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) terdiri dari 4 (empat) bab, setiap bab terdiri atas subbab di mana deretan yang telah disusun adalah sebagai berikut.

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN KARYA TULIS TUGAS AKHIR

HALAMAN PERSETUJUAN DARI TIM PENILAI KARYA TULIS TUGAS AKHIR

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS TUGAS AKHIR

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar belakang
- 1.2 Rumusan masalah
- 1.3 Tujuan penulisan
- 1.4 Ruang lingkup pembahasan
- 1.5 Manfaat penulisan

BAB II LANDASAN TEORI

- 2.1 Dasar hukum
- 2.2 Rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga (RKA-K/L)
- 2.3 Teori penetapan tujuan (*Goal setting theory*)
- 2.4 Standar biaya masukan (SBM)

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

- 2.1 Metode pengumpulan data
- 2.2 Gambaran umum KPPN Pematangsiantar
 - 2.2.1 Profil KPPN Pematangsiantar
 - 2.2.2 Visi dan misi
 - 2.2.3 Tugas pokok dan fungsi
 - 2.2.4 Struktur organisasi
- 2.3 Pembahasan hasil
 - 2.3.1 Pencantuman daftar Standar Biaya Masukan dalam penyusunan RKA-K/L di KPPN Pematangsiantar tahun anggaran 2022

2.3.2 Tinjauan penerapan Standar Biaya Masukan pada RKA-K/L KPPN

Pematangsiantar tahun 2022

BAB IV KESIMPULAN

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

SURAT RISET

DAFTAR RIWAYAT HIDUP